

**ANALISIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
SOLOK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
TAHUN 2022**

ABSTRAK

Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok Pada Masa Pandemi Covid-19

SYAKHRONI HAREFAN
NPM. 181000461201052

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan negara yang berharga bagi penyelenggaraan, penerapan, dan membantu pembangunan nasional. Pajak diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Diantara sembilan jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPHTB dan PBB-P2 memiliki potensi penerimaan pemajakan yang cukup besar. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Statistik Deskriptif. Penelitian ini bersifat studi empiris dengan mengolah data yang tersedia secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Sehingga pada penelitian ini digunakan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020. Pada pemungutan PBB-P2, situasi pandemi covid-19 memiliki pengaruh terhadap penetapan target yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok. untuk realisasi pemungutan PBB-P2 dari data yang diperoleh terlihat tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi covid-19. Hal tersebut terlihat pada realisasi pemungutan PBB-P2 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.. Pada pemungutan BPHTB, situasi pandemi covid-19 tidak mempengaruhi target dan realisasi pemungutan BPHTB. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan realisasi pemungutan BPHTB setiap tahunnya.

Kata Kunci : BPHTB, PBB P-2, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Analysis of Collection of Duties for Acquisition of Rights on Land and/or Buildings (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Framework of Increasing Regional Original Income in Solok City During the Covid-19 Pandemic

SYAKHRONI HARFAN
NPM. 181000461201052

UNIVERSITY OF MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Tax is one of the sources of state revenue used for the implementation of development and is a valuable source of state revenue for the management, implementation and assistance of national development. Taxes are expected to help the government to improve the welfare and prosperity of the Indonesian people fairly and equitably. Among the nine types of taxes that are under the authority of the Regency/City Government, BPHTB and PBB-P2 have a large potential for tax revenue. The type of research used in this research is descriptive statistics method. This research is an empirical study by processing available data periodically to see the development of the object of research during a certain period. So, in this study, data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) are used for 3 (three) years from 2018-2020. In the PBB-P2 collection, the pandemic Covid-19 situation had an influence on the target setting carried out by the Solok City Government. For the realization of PBB-P2 collection from the data obtained, it seems that it is not affected by the conditions of the pandemic covid-19. This can be seen in the realization of PBB-P2 collection which has increased every year. In collecting BPHTB, the pandemic COVID-19 situation does not affect the target and realization of BPHTB collection. This can be seen by the increase in the realization of BPHTB collections every year.

Keyword : *Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P-2), Locally-generated revenue (PAD), Covid-19 Pandemic*

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I. D., Putri, T. E., & Suangga, A. (2019). Effect of Administrative Reform and Taxpayer Satisfaction on Taxpayer Compliance As Recorded By Tax Offices of Majalaya Bandung. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(1), 64–76.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Dian Nurani, M. (2016). *Membangun investasi daerah*. 1–128.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Desrtasi Ilmu Manajemen*. Universitas Diponegoro.
- Fery, I. (2021). Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 72–83.
- Friskianti, Y., Dwi Handayani Jurusan Akuntansi, B., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V3I4.4216>
- Hanafiah, Sutedja, A., & Ahmaddien, I. (n.d.). *PENGANTAR STATISTIKA*. <https://doi.org/10.31237/OSF.IO/CZJ7U>
- Hendri Saldi, A., Zulgani, Z., & Nurhayani, N. (2021). Analisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 201–210. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16260>

- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Marasabessy, zainal abidin, & Santoso, B. (2014). pengaruh dukungan rekan kerja pada kreativitas karyawan dengan autonomi kerja dan efikasi diri kreatif sebagai pemoderasi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 32–44.
- Mardiasmo, P. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3210>
- Masrun. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.29303/jap.v1i2.9>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55. (2016). *Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Pradiska, K. I. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(03), 920–931. <https://repo.undiksha.ac.id/7045/>
- Rina Milyati Yuniastuti, Jhon Nasyaroeka, H. W. A. (2019). Efektifitas Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(2), 1–8.

<http://ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/JEM/article/view/359>

Rizki, I. A. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88.

Sekaran, U. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach - Uma Sekaran, Roger Bougie - Google Buku*.

Suci, D. (2013). Pengaruh Penerapan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. (2022). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Issue 104172).

Utomo, Dwiwarso, Setiawanta, Yulita, Yulianto, A. (n.d.). *Perpajakan - Google Books*. 2011.

